



## BAB VI

# PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAH

*Bab ini memuat laporan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2014. Secara umum Bab ini terdiri dari kerjasama antar daerah, kerjasama dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi vertikal, pencegahan dan penanggulangan bencana, dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.*

Sebagai badan eksekutif daerah, dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki tugas umum penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan daerah tersebut didasarkan pada azas desentralisasi dan kewenangan otonom yang dimiliki, dimana secara teknis fungsional dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada baik oleh badan, dinas, kantor, bagian maupun unit kerja lainnya yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Secara operasional, tugas-tugas umum pemerintahan daerah dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan pokok penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, seperti kerjasama antar daerah, kerjasama daerah dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi vertikal, pencegahan dan penanggulangan bencana, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

### A. KERJASAMA ANTAR DAERAH

Otonomi daerah yang digulirkan pemerintah dimaksudkan agar masing-masing daerah dapat leluasa dalam mengelola sumber daya yang ada dengan berbagai kewenangan yang telah diserahkan. Konsekuensi dari hal tersebut adalah daerah dituntut untuk menciptakan berbagai terobosan guna memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama antar daerah memungkinkan suatu daerah untuk memaksimalkan berbagai potensinya, baik potensi sumber daya alam maupun potensi sumber daya manusia.

Globalisasi yang terjadi saat ini menyebabkan suatu daerah tidak dapat mengasingkan diri dan terlepas dari daerah yang lain. Suatu daerah dituntut untuk mengikuti perkembangan yang terjadi secara global baik perkembangan ilmu



pengetahuan, teknologi, maupun perkembangan di bidang-bidang yang lain. Guna mengantisipasi hal tersebut dan mempertahankan eksistensinya, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur perlu menjalin kerjasama dengan daerah-daerah lain maupun dengan pihak- pihak lainnya untuk mengikuti perkembangan-perkembangan tersebut. Dengan potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kerjasama antar daerah dimasa yang akan datang.

Beberapa kebijakan daerah telah ditetapkan sebagai upaya untuk memberikan arah dan landasan hukum dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dalam rangka mewujudkan keserasian/sinergitas hubungan antar dan inter lembaga pemerintahan daerah, terjalinnya hubungan kerjasama yang baik antar daerah, mantapnya koordinasi pemerintahan, terciptanya suasana yang kondusif, aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat, terbangunnya sistem informasi dan komunikasi daerah yang mudah, aktual dan terpercaya.

Kerjasama antar daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur antara lain dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Kerjasama ini berupa penentuan tapal batas sebagai dasar penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Adapun output dari kegiatan kerjasama ini ialah kesepakatan tapal batas Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Kabupaten tetangga dan rencana pembangunan diwilayah perbatasan.

## **B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA**

Kerjasama daerah dengan pihak ketiga juga merupakan salah satu upaya daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prinsip yang dianut dalam pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga sama dengan prinsip yang dianut dalam kerjasama antar daerah, yaitu : efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah NKRI, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan dan kepastian hukum.

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata cara Pelaksanaan Kerjasama daerah, menyatakan bahwa kerjasama daerah adalah kesepakatan antar gubernur atau gubernur dengan bupati/walikota atau antara bupati/walikota dengan bupati/walikota yang lain dan atau gubernur, bupati/walikota dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban. Peraturan pemerintah tersebut juga menyebutkan bahwa pihak ketiga adalah



departemen/lembaga pemerintah non departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, badan hukum milik daerah, seperti yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.

Adapun kerjasama yang dilakukan oleh Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan selama tahun 2014 yaitu :

#### **1. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi**

##### Universitas Jambi

Kerjasama dengan Universitas Jambi telah dilaksanakan sejak tahun 2005 melalui dokumen MoU Nomor 450/A/2005.151/J21/LL/2005 yang ditandatangani antara Bupati Tanjung Jabung Timur dan Rektor Universitas Jambi. Kerjasama dengan Universitas Jambi dibidang pendidikan diantaranya : pendidikan jalur khusus bagi putra-putri Tanjung Jabung Timur untuk mengikuti program Diploma-3 Akuntansi fakultas ekonomi, peserta program ini telah kembali menjalankan tugasnya di Tanjung Jabung Timur pada akhir tahun 2012 lalu. Dengan kembalinya bertugas setelah menyelesaikan study diharapkan dapat memberi kontribusi dalam bagi pemerintah daerah dalam usaha mencapai predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), selain peningkatan sumber daya aparatur.

Kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan juga dilakukan tahun 2010, pemerintah daerah memberi beasiswa kepada 40 orang putra-putri Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mengikuti pendidikan Diploma-3 Agribisnis Penyuluh Pertanian pada Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Sebanyak 22 orang telah berhasil menyelesaikan studinya pada tahun 2014 dan pada tahun yang sama sebanyak 17 orang telah menjalankan tugasnya, sedangkan 5 orang lainnya akan bertugas pada tahun 2015. Penyelenggaraan pendidikan penyuluh pertanian ini merupakan salah satu usaha pemerintah daerah dalam peningkatan hasil panen dan peningkatan sumber daya manusia serta pemenuhan kebutuhan tenaga penyuluh. Selanjutnya kerjasama dengan Universitas Jambi berupa pembukaan program Diploma 3 kelautan dan Perikanan kampus Muara Sabak yang telah dimulai sejak tahun ajaran 2012

Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Universitas Jambi juga dilakukan dalam penyusunan dokumen-dokumen penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang membutuhkan tenaga akademis sebagai narasumber.



---

#### Universitas Gajah Mada

Salah satu upaya Pemda Kabupaten menjadikan daerah ini sebagai sentra peternakan Jambi, melalui peningkatan hasil ternak, kesehatan ternak dan peningkatan serta pemenuhan kebutuhan tenaga mantri hewan ialah dengan memiliki mantri hewan/Ahli madya kesehatan yang handal. Strategi yang dilakukan ialah berkerjasama dengan Universitas Gajah Mada mendidik sebanyak 25 orang putra Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Diploma-3 Kesehatan Hewan di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gajah Mada dan saat ini telah melaksanakan tugasnya melayani masyarakat di sektor kesehatan hewan sebagai tenaga honorer.

#### Universitas Batanghari Jambi

Selain kerjasama dibidang pendidikan sejak tahun 2010 seperti penyelenggaraan pendidikan pada jurusan teknik tangkap ikan, teknik sipil, dan teknik lingkungan, kerjasama dengan Universitas Batanghari Jambi juga dilakukan dalam penyusunan dokumen-dokumen penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang membutuhkan tenaga akademis sebagai narasumber.

### **2. Kerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI**

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik terutama yang berkaitan dengan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka mencapai status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan daerah dan pencapaian pertanggungjawaban pada aspek manajerial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur membangun jaringan kerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (BPKP-RI) yang tertuang dalam Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) Nomor 050/968/DATA/BAPPEDA dan Nomor PRJ-5118/PW05/2007.

### **3. Kerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan**

Kerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur membangun jaringan kerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan RI (BPK-RI) yang tertuang dalam Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) Nomor 188/NK/X-XIII.2/11/2012 dan Nomor 180/04/HKM/2012.



---

**4. Kerjasama dengan Kanwil Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Jambi**

Dalam rangka meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel maka sejak tahun ini telah diterapkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah secara online dalam rangka mempersiapkan pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual. Pada tanggal 24 September lalu, telah pula ditandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) mengenai Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah antara Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Nomor NK-6/WBP.06/2014 dan Nomor 900/2474/DPKAD/2014.

**5. Kerjasama dengan Perusahaan Migas Petrochina Jabung Ltd.**

Dalam rangka mewujudkan kewajiban perusahaan berupa *Cooperate Social Responsibility* (CSR), Petrochina Jabung Ltd. tahun 2014 telah merealisasikan program CSRnya dalam beberapa sektor pembangunan dengan anggaran sebesar Rp. 70.060.436.300,00, diantaranya : Penyediaan Akses Air Bersih (Telah diselesaikan Tahap I (8 Desa), Tahap II (6 Desa), dan sedang persiapan untuk tahap ke III (11 Desa); Pembangunan Pustu dan Polindes di Desa Lagan Tengah; Peningkatan kapasitas guru dan manajemen sekolah; Pendidikan, Latihan dan magang bidang otomotif, bidang elektronika, bidang Pertukangan, bidang menjahit, bidang operator, bidang keteknikan; Magang Tenaga Bidan RS Mataher; Pengembangan Usaha Tani (bantuan Hand Tractor dan power threaser); Pemberdayaan petani melalui program pengembangan sentra peternakan; Pembangunan Jembatan Besi Blok C2 (panjang 25 m lebar 4m); Rehabilitasi jalan dua jalur di komplek perkantoran Kec. Muara Sabak barat; Pembangunan Jaringan Listrik SUTR RT 1 - 3 desa Pandan Makmur sepanjang 2500 Meter; Pemasangan Jaringan Listrik SUTR Dusun Sungai Labu RT 15 Desa Lagan Ulu Sepanjang 1500 M; Pemasangan Jaringan Listrik SUTR dan SUTM di Dusun Sepakat Indah; Pembangunan Jaringan Listrik SUTR Simpang 35 ke Desa Simpang Pandan sepanjang 4000 M; Peningkatan kapasitas stakeholder dalam pembangunan partisipatif; Peningkatan sarana dan prasarana pembelajaran pendidikan formal; Peningkatan kesehatan ibu dan anak melalui revitalisasi POSYANDU; Program sanitasi total berbasis masyarakat; Bantuan Bencana Alam Lokal; Bantuan Bencana Alam Nasional; Pengembangan perpustakaan keliling; Pemberian BBG Converter Kit; Pembangunan Community Center di Wilayah Operasi; Peningkatan



Produktivitas pertanian; Pengembangan kesadaran lingkungan di sekolah dan komunitas; Pilot project konservasi lingkungan di komunitas; pembangunan jembatan besi Sungai Tering (Panjang 40 M lebar 4 M); Pembangunan jalan ruas blok C blok D blok B sepanjang 10,5 KM; Pembangunan Jalan ruas Simpang Bulian - Nibung Putihsepanjang 12 KM; Pemberian Beasiswa S1; Pemberian Beasiswa SMK/SMA; Program Penyediaan akses air bersih; serta pembangunan listrik Solar Cell.

**6. Kerjasama dengan Politeknik Kesehatan Departemen Kesehatan Jambi**

Kerjasama dengan Politeknik Kesehatan telah dimulai sejak tahun 2004, dan sampai saat ini telah meluluskan lebih dari 120 ahli madya kebidanan dan 80 ahli madya keperawatan. Penyelenggaraan pendidikan kebidanan ini merupakan salah satu usaha pemerintah daerah dalam upaya pemerataan penyebaran bidan sampai ke desa-desa sangat terpencil dan sangat-sangat terpencil, yang merupakan tenaga strategis untuk penurunan angka kematian ibu dan anak.

**7. Kerjasama dengan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk**

Kerjasama dengan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk dalam hal pembangunan dan pengembangan Teknologi Informasi (*e-government*) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui MoU No.050/393/Eko/Bappeda, dan No.HK.840/DES-U01/2008 pada tanggal 21 Oktober 2008. Sampai dengan tahun 2013 ini pengembangan sistem informasi berdasarkan teknologi informasi (*e-government*) sudah dapat diimplementasikan secara bertahap ditengah keterbatasan sumber daya tenaga yang ada di Kabupaten ini.

**8. Kerjasama dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi**

Salah satu bentuk kerjasama dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi pada tahun 2014 ialah penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp. 17.500.000.000,00 kepada PT. Bank Jambi. Kerjasama yang lain ialah penyaluran kredit modal kerja sebesar Rp. 7.900.000.000,00 yang tertuang dalam Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) Nomor Pemda : 500/2974/PEREKON/2012 dan Nomor Bank Jambi : 33.12/PKS.DIR/2012.

Untuk meningkatkan pelayanan publik dalam melakukan pembayaran pajak, pemerintah daerah berkerjasama dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi pada bulan Maret lalu, yang tertuang dalam Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) Nomor Pemda : 973/845/131/DPKAD/2014 dan Nomor Bank Jambi : 33.12/PKS.DIR/2012. Kerjasama ini diadakan untuk penerimaan pembayaran serta



penatakelolaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

### **C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DAERAH**

Koordinasi utama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah selama tahun 2014 adalah koordinasi institusional. Kegiatan koordinasi yang dilakukan mampu secara efektif mengkomunikasikan berbagai informasi dan masukan yang diperlukan oleh segenap penyelenggara pemerintahan, sehingga proses pelaksanaan tugas dan fungsi segenap aparatur penyelenggara negara dapat berjalan optimal melalui pengaturan bersama dan kesepakatan bersama.

Beberapa koordinasi utama yang dilaksanakan antara lain:

1. Koordinasi dengan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Koordinasi dengan unsur Forkompimda Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
3. Koordinasi dengan aparat keamanan dan penegak hukum.
4. Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.
5. Koordinasi dengan perangkat pusat di daerah dan instansi vertikal lainnya seperti BPS Kabupaten, Balai Taman Nasional Berbak dan BPN Kabupaten.

Pelaksanaan koordinasi yang bersifat utama dan strategis dilakukan oleh Bupati Tanjung jabung Timur bersama-sama dengan unsur Forkompimda Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta perangkat daerah yang terkait. Bersama dengan para pimpinan wilayah, Bupati Tanjung Jabung Timur melakukan rapat-rapat atau menyelenggarakan Forum Musyawarah Pimpinan Daerah (Forkompimda), sedangkan dengan perangkat daerah dilakukan dalam bentuk rapat-rapat koordinasi yang sifatnya koordinasi teknis. Rapat atau forum koordinasi dimaksudkan dalam rangka konsultasi dan koordinasi untuk mewujudkan dan memelihara stabilitas juga situasi serta kondisi daerah yang kondusif.

Rapat Forkompimda yang dilakukan memiliki beberapa tujuan antara lain :

1. Mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara berdaya guna dan berhasil guna.
2. Mengevaluasi dan melakukan penilaian atas intensitas, ekstensitas, situasi dan kondisi ketentraman, keamanan dan ketertiban dalam masyarakat serta merumuskan langkah-langkah strategis, teknis dan taktis yang diperlukan dalam rangka





pengendalian, pencegahan maupun penanggulangan ketentraman dan ketertiban umum.

3. Menentukan sistem, prosedur dan mekanisme operasional pengamanan pelaksanaan kebijakan-kebijakan dan program pembangunan kota guna mewujudkan stabilitas nasional dan daerah yang mantap dan terkendali serta kondusif.

Selain koordinasi ke samping (horizontal) dan ke bawah, tugas umum pemerintahan yang bersifat koordinatif juga diselenggarakan secara vertikal, baik kepada instansi vertikal di tingkat provinsi maupun dengan berbagai kementerian teknis terkait.

Koordinasi dengan kementerian yang dilaksanakan sampai dengan tahun 2014 adalah dengan Kementerian Sosnakertrans melalui Program Pembangunan Infrastruktur Daerah (PDID) atau dikenal dengan KTM (Kota Terpadu Mandiri). PDID merupakan salah satu instrumen mempercepat pembangunan dan kemakmuran suatu daerah yang tertinggal. Instrumen ini menitikberatkan pada percepatan suatu daerah dengan mengintegrasikan beberapa sub kawasan dengan segala potensi dan peluang yang tersedia sehingga menjadikannya suatu kawasan pusat pertumbuhan dengan beberapa kota penyangga. Keterpaduan dan keselarasan yang dikembangkan diharapkan mampu meningkatkan gairah perekonomian daerah dan meningkatkan daya beli masyarakat hingga tercapai tingkat kesejahteraan dan kemandirian yang diinginkan.

Di sektor pertanian, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan kerjasama dengan Kementerian Pertanian dalam pengembangan lahan suboptimal rawa pasang surut sebagai upaya tetap menjadikan daerah ini sebagai lumbung pangan Provinsi Jambi dan meningkatkan kesejahteraan kehidupan petani tanaman pangan.

Di sektor kehutanan, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga melaksanakan kerjasama dengan Balai Taman Nasional Berbak. Koordinasi diwujudkan dengan pembentukan forum ini harus dilakukan mengingat keberadaan Taman Nasional Berbak termasuk administratif sekaligus aset Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Di sektor perumahan rakyat, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga melaksanakan kerjasama dengan Kementerian Perumahan Rakyat dalam program bedah rumah. Pada tahun 2014 ditarget sebanyak 256 unit rumah di wilayah kecamatan Muara Sabak Timur untuk dibedah, akan tetapi hanya terealisasi sebanyak 243 unit sedangkan 13 unit yang tidak terealisasi karena status kepemilikan lahan.





Di sektor penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga melaksanakan kerjasama dengan Kementerian PPN/Bappenas dalam melaksanakan program MP3KI dengan tujuan akselerasi pengurangan kemiskinan dan program MP3EI dengan tujuan akselerasi pertumbuhan dengan pemerataan (*Growth with Equity*).

Di sektor sumber daya alam, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan kerjasama dengan *Millennium Challenge Corporation* (MCC) yang tertuang dalam Nota Kesepahaman antara Lembaga Wali Amanat (*Millennium Challenge Account* - Indonesia) dengan Pemerintah Provinsi Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 13/NK.GUB/BAPPEDA/2012 tanggal 8 Nopember 2012 tentang Persiapan dan Pelaksanaan Program *Compact* Proyek Kemakmuran Hijau di Provinsi Jambi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dengan meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan energi terbarukan, dan meningkatkan produktivitas dan mengurangi emisi gas rumah kaca berbasis lahan dengan cara memperbaiki kegiatan pemanfaatan lahan serta pengelolaan sumber daya alam.

Secara keseluruhan, pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dalam bentuk koordinasi dilaksanakan dalam bentuk pelaporan, rapat-rapat dan forum koordinasi dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintah daerah. Hasil pokok yang dicapai selama tahun 2014 adalah meningkatnya manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kota yang lebih efektif dan terpadu.

#### **D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA**

Sepanjang tahun 2014, kemarau panjang yang melanda hampir seluruh kawasan Indonesia tidak terkecuali kabupaten Tanjung Jabung Timur berpotensi menimbulkan bencana kebakaran. Kebakaran yang disebabkan kemarau ini lebih sering terjadi di kawasan hutan maupun perkebunan yang pada umumnya adalah lahan gambut. Penyebab kebakaran lain terjadi juga karena kelalaian manusia seperti pembukaan lahan dengan membakar dan instalasi yang kurang baik atau tidak sesuai dengan standar minimal yang telah ditentukan.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mempunyai potensi bencana alam antara lain : banjir, kebakaran, puting beliung, tanah longsor dan sambaran petir, pada tahun 2014 hanya mengalami tiga jenis bencana alam dari lima jenis potensi bencana



alam di kabupaten ini. Bencana alam yang terjadi di tahun 2014 sebanyak 53 bencana yang terdiri dari bencana kebakaran bangunan rumah penduduk sebanyak 17 kali, bencana kebakaran lahan sebanyak 34 kali dan bencana puting beliung sebanyak 2 kali.

### **1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya**

Bencana yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2014 lebih banyak diakibatkan karena kelalaian dari manusia dari pada faktor alam. Berikut kejadian/bencana yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2014 :

- a. Bencana kebakaran lahan hutan di Desa Pandan Sejahtera Kecamatan Geragai pada tanggal 29 Januari 2014 dengan luas kawasan hutan 120 Ha
- b. Bencana kebakaran lahan dan hutan di Desa Pematang Rahim, Mencolok, sinar wajo Kecamatan Mendahara Ulu pada tanggal 12 Februari 2014
- c. Bencana kebakaran lahan dan hutan di desa Rantau Karya Kecamatan Geragai pada tanggal 14 Februari 2014 dengan luas kawasan hutan 70 Ha
- d. Bencana Kebakaran lahan dan dan hutan di desa Pandan Lagan Kec. Geragai pada tanggal 18 Februari 2014 dengan luas kawasan hutan 125 Ha.
- e. Bencana Kebakaran sungai buluh pada tanggal 19 Februari 2014
- f. Bencana kebakaran lahan dan hutan Parit Culum Kec. Mauara Sabak Barat pada tanggal 22 Februari 2014
- g. Bencana kebakaran lahan dan hutan di desa pandan sejahtera kec. Geragai dan desa Catur Rahayu Kec. Dendang pada tanggal 24 Februari 2014 dengan luas kawasan hutan 120 Ha.
- h. Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan Teluk Dawan Kec. Dendang pada tanggal 25 Februari 2014 dengan luas kawasan 100 Ha.
- i. Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan desa Rantau Karya , Suka Maju Kec. Geragai pada tanggal 3 Maret 2014 dengan luas kawasan hutan 20 Ha
- j. Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan desa Sungai Rambut Kec. Berbak pada tanggal 3 Maret 2014
- k. Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan desa Teluk Dawan Kec. Muara Sabak Barat pada tanggal 3 Maret 2014
- l. Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan desa Catur Rahayu Kec. Dendang pada tanggal 3 Maret 2014
- m. Bencana kebakaran Lahan dan Hutan Desa Jati Mulyo Kec. Dendang pada tanggal 3 Maret 2014



- n. Bencana kebakaran lahan dan Hutan Desa Air Hitam Laut, Labuhan Pering, Sei. Cemara dan Remau Baku Tuo Kec. Sadu bulan Februari s/d Maret 2014 jumlah lahan 20 Ha.
- o. Bencana Kebakaran Desa Kota Harapan Kec. Ma. Sabak Timur pada tanggal 19 Maret 2014 dengan kerugian 1 unit
- p. Bencana kebakaran lahan di Desa Karya Bahkti Kecamatan Rantau Rasau pada tanggal 20 Maret 2014
- q. Bencana Kebakaran Bangunan Rt. 02 Dusun Sei. Palas Desa Rantau Rasau Kec. Berbak pada tanggal 25 Maret 2014 dengan kerugian 1 unit
- r. Bencana Kebakaran lahan dan hutan tanah Kecamatan Rantau Rasau desa (Titik api blok – N, SK,03, Blok O Sk.05 dan Blok P SK.7) Kec. Berbak pada tanggal 26 Maret 2014.
- s. Bencana kebakaran Hutan Desa Cemara Kec. Sadu pada tanggal 27 Maret 2014
- t. Bencana Kebakaran Desa Makmur Desa Koto Kandis Kec. Dendang pada Tanggal 11 April 2014
- u. Bencana Kebakaran Kelurahan Kampung laut Kec.Kuala Jambi pada tanggal 12 Juni 2014 dengan kerugian 23 unit 1 korban
- v. Bencana kebakaran Rt. 10 SK.09 Dusun II Desa Harapan Makmur Kec. Rantau Rasau pada tanggal 28 Juli 2014 dengan kerugian 1 unit
- w. Bencana Angin Putting Belu dari bulan Januari s/d Agustus Nihil
- x. Bencana Kebakaran Bangunan Jl.Soerharto Rt.13 Ds. Teladan Desa Mendahara Tengah pada tanggal 8 Agustus 2014 dengan kerugian 6 unit
- y. Bencana kebakaran Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang pada tanggal 10 Agustus 2014 dengan kerugian 3 unit
- z. Bencana Kebakaran Desa Suka Maju Kec. Geragai pada tanggal 15 Agustus 2014 sebanyak 1 unit
- aa. Bencana kebakaran Lahan hutan di desa Rano Kec. Geragai pada tanggal 8 September 2014
- ab. Bencana kebakaran Parit 02 sungai niyur Desa kota Raja Kec. Muara Sabak Timur pada tanggal 9 September 2014 sebanyak 1 unit
- ac. Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan desa Pangkal Bulian Kec. Muara.Sabak Barat pada tanggal 10 September 2014
- ad. Bencana kebakaran Lahan dan Hutan Desa Simpang Datuk Kec. Nipah Panjang pada tanggal 13 September 2014



- ae. Bencana Kebakaran lahan dan Hutan Desa Rantau Karya Kec. Geragai pada tanggal 14 September 2014
- af. Bencana Kebakaran lahan dan Hutan Pembatasan Berbak Rawasari, Catur rahayu, Kec. Dendang pada tanggal 15 September 2014
- ag. Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan Desa sungai sayang kec. Sadu pada tanggal 16 September 2014
- ah. Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan Rantau Rasau II Kec. Rantau Rasau pada tanggal 17 September 2014
- ai. Bencana Kebakaran Desa Sungai Tering Kec. Nipah Panjang Kec. Rantau Rasau pada tanggal 18 September 2014 sebanyak 1 unit
- aj. Bencana Kebakaran Kec. Pandan Lagan Kec. Geragai pada tanggal 19 September 2014
- ak. Bencana Kebakaran Desa Sungai Jambat Kec. Sadu pada tanggal 23 September 2014
- al. Bencana Angin Puting Beliung Kel. Kampung Laut Kec. Kuala Jambi pada tanggal 24 September 2014 sebanyak 17 unit
- am. Bencana Angin Puting Beliung Kel. Tanjung Solok Kec. Kec. Kuala Jambi pada tanggal 24 September 2014 sebanyak 12 unit
- an. Bencana Kebakaran Desa Pematang Rahim Kec. Mendahara Ulu pada tanggal 25 September 2014
- ao. Bencana Kebakaran Desa Pematang Rahim Kec. Mendahara Ulu pada tanggal 2 Oktober 2014
- ap. Bencana Kebakaran Kelurahan Nibung Putih Kec. Ma. Sabak Barat. pada tanggal 2 Oktober 2014
- aq. Bencana Kebakaran Bangunan Rumah desa Pematang Rahim Kec. Mendahara Ulu pada tanggal 4 Oktober 2014 sebanyak 1 unit
- ar. Bencana Kebakaran Bangunan Rumah Kel. Teluk Dawan Kec. Ma. Sabak Barat pada tanggal 5 Oktober 2014 sebanyak 1 unit
- as. Kebakaran Lahan dan Hutan Desa Jati Mulyo Kec. Dendang pada tanggal 8 Oktober 2014
- at. Kebakaran Lahan dan Hutan Desa Jati Mulyo Kec. Dendang pada tanggal 16 Oktober 2014
- au. Kebakaran Lahan dan Hutan Desa Jati Mulyo Kec. Dendang pada tanggal 17 Oktober 2014
- av. Kebakaran Lahan dan Hutan Bandar Jaya Harapan Makmur Kec. Rantau Rasau pada tanggal 17 Oktober 2014



- aw. Kebakaran Bangunan Rumah desa Teluk Majelis Kec. Kuala Jambi pada tanggal 18 Oktober 2014 sebanyak 4 unit
- ax. Kebakaran Lahan dan Hutan Pt. Makmur Bina Lestari Kec. Berbak pada tanggal 28 Oktober 2014
- ay. Bencana Angin Puting Beliung bulan Oktober Nihil
- az. Kebakaran Lahan dan Hutan Desa Catur Rahayu Kec. Dendang pada tanggal 3 November 2014
- ba. Kebakaran Lahan dan Hutan Kel. Nibung Putih Kec. Muara Sabak Barat pada tanggal 5 November 2014
- bb. Kebakaran Bangunan Rumah Rt. 17 Desa Pandang Sari Kel. Pandan Jaya Kec. Geragai pada tanggal 8 November 2014 sebanyak 1 unit
- bc. Kebakaran Bangunan Rumah Kel. Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang pada tanggal 24 November 2014 sebanyak 1 unit
- bd. Kebakaran Bangunan Rumah Rt.7 Dusun Pancasila desa Simbur Naik Kec. Ma. Sabak Timur pada tanggal 25 November 2014 sebanyak 1 unit
- be. Bencana Puting Beliung pada bulan November 2014 Nihil
- bf. Bencana Puting Beliung Desa Simbur Naik Kec. Mara Sabak Timur pada tanggal 7 Desember 2014 sebanyak 12 unit
- bg. Bencana Kebakaran Bangunan Rumah desa Iambur Luar Kec. Muara Sabak Timur pada tanggal 10 Desember 2014 sebanyak 1 unit

## **2. Status Bencana**

Bencana alam yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah banjir, kebakaran, angin puting beliung dan tanah longsor dan masih berstatus bencana lokal.

## **3. Sumber dan Jumlah Anggaran**

Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, baik bencana banjir, kebakaran, angin puting beliung dan tanah longsor, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan bencana yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

## **4. Antisipasi Daerah**

Antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana dilakukan dengan metode-metode preventif, seperti peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan terjadinya bencana, penyuluhan hukum tentang pentingnya memenuhi ketentuan-



ketentuan perundang-undangan dalam pengelolaan ruang dan pemukiman, peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dan lain-lain.

Disamping itu penanganan terhadap kejadian bencana baik dari sebelum dan sesudah terjadinya bencana, sangat diperlukan adanya program serta koordinasi antar stake holder/instansi terkait dalam penanganan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah membuat program kegiatan antara lain:

- a. Pembentukan satgas penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi baik ditingkat desa/kelurahan dan kecamatan.
- b. Koordinasi dengan kecamatan untuk pembuatan posko-posko bencana
- c. Mengadakan pelatihan terhadap satgas PBP tentang penanggulangan bencana baik dari sebelum maupun sesudah terjadi bencana
- d. Penyebaran informasi serta himbauan kepada masyarakat akan gejala-gejala terjadi bencana dan agar selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap kejadian bencana
- e. Koordinasi antar stake holder/instansi terkait dalam penyamaan langkah dalam kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana
- f. Mengadakan sarana dan prasarana untuk evakuasi korban bencana alam.

Selanjutnya beberapa SKPD terkait telah pula mengantisipasi terhadap kemungkinan timbulnya bencana seperti : Dinas Sosnakertrans, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian dan Dinas Tata Kota.

## **5. Satuan Kerja yang Menangani Bencana**

Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bencana adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, namun disamping itu terdapat dinas /instansi yang juga terlibat atau mempunyai tugas dan fungsi dalam penanganan bencana antara lain :

- a. Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat
- b. Dinas Sosnakertrans bidang pemberian bantuan (Bansos)
- c. Dinas Tata Kota pada bidang penanggulangan kebakaran
- d. Dinas Kehutanan dan Perkebunan
- e. Pekerjaan Umum
- f. Dinas Kesehatan
- g. dan lain-lain



## **6. Kelembagaan yang Khusus Dibentuk untuk Menangani Bencana**

Bahwa bencana dapat menghambat dan mengganggu baik kehidupan dan penghidupan masyarakat maupun pelaksanaan pembangunan dan hasilnya sehingga upaya penanggulangan bencana perlu dilakukan dengan tindakan yang terencana, terkoordinasi, terpadu, tepat dan cepat. Untuk itu diperlukan upaya nyata dalam rangka penanggulangannya dengan mengerahkan sumber daya yang ada dan dalam pelaksanaannya diperlukan satu wadah/lembaga tetap yang mengkoordinir seluruh rangkaian kegiatan tersebut.

Dalam hal ini pemerintah telah memberikan juklak dan juknis dalam penanganannya secara nasional dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Bakornas PBP), sedangkan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dikoordinasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang terbentuk pertengahan tahun 2014.

## **E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

Ketentraman dan ketertiban umum dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan terhadap aparat trantib guna mewujudkan hubungan koordinasi yang baik serta meningkatnya kemampuan dan kesiapan aparat dalam penanganan berbagai permasalahan hukum dan trantib, pengamanan aset-aset daerah serta penegakan Peraturan Daerah.